

Bupati Kotabaru terima DIPA senilai Rp1,347 triliun



<https://kalsel.antaranews.com/berita/132860/bupati-kotabaru-terima-dipa-senilai-rp1347-triliun>

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Kalimantan Selatan, TA 2020 di Aula Gedung KH Idham Chalid Jalan Dharma Praja, No 1 Kompleks Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Banjarbaru, Rabu tadi. Kotabaru menerima DIPA dan dana alokasi TKDD untuk tahun 2020 sebesar Rp 1.347.999.506 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan kepada seluruh perangkat pemerintahan di Kalimantan Selatan untuk terus bergerak membangun daerah masing-masing dengan profesional dan transparan. Ia meminta kepada Bupati dan Walikota agar penggunaan anggaran dapat dijaga secara efektifitas dan akuntabilitas, serta tata kelola keuangan hingga pertanggungjawabannya, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Kalau ada yang tidak berjalan lancar dalam penggunaan anggaran ini, dapat kita artikan wilayah tersebut menghambat pembangunan dan penggunaan APBN kita yang tentunya akan kita beri peringatan, ujarnya.

Untuk itu, Gubernur mengingatkan kepada pemerintah daerah dan perangkat kerjanya agar dapat menjaga efektivitas dan akuntabilitasnya, serta melakukan perbaikan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Kami meminta komitmen dan dukungan kuat dari pemerintah daerah terhadap program pembangunan, katanya.

Tampak hadir juga pada acara ini, seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPKAD Kotabaru, serta Kepala Bappeda Kotabaru.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, Bupati Kotabaru terima DIPA senilai Rp1,347 triliun, Senin, 30 Desember 2019.
2. <https://metro7.co.id>, Bupati Kotabaru terima DIPA senilai Rp1,347 triliun, Senin, 30 Desember 2019.

Catatan:

☛ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:

1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;
2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

☛ 12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);
3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%);
4. Data Kontrak (bobot 10%);
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);
6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);

8. Retur SP2D (bobot 5%);
9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);
10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);
11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber: <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran.html>)